OPTIMALISASI PENGEMBANGAN EKONOMI MARITIM DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Optimization of Maritime Economic Development in Southeast Sulawesi Province

Syamsir Nur¹ dan Roslindah Daeng Siang²

¹Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, e-mail : syamsirnur81@gmail.com

²Jurusan Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, e-mail : roslindahds@yahoo.co.id

ABSTRAK

Peluang ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut yang sedemikian besar di wilayah Sulawesi Tenggara sudah sepatutnya memberikan kontribusi yang besar pula bagi peningkatan perekonomian daerah, bahkan menjadi sektor penggerak ekonomi daerah yang dominan. Namun potensi sektor maritim belum termanfaatkan secara optimal, yang ditandai dengan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah yang masih lebih rendah dibandingkan sektor pertanian dan perkebunan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bersentuhan dengan sektor kemaritiman belum menggembirakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang mendukung ekonomi maritim serta strategi pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat berbagai kebijakan yang diidentifikasi dalam mendukung pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain: kebijakan di bidang pengembangan ekonomi daerah, kebijakan di bidang perhubungan, kebijakan di bidang perikanan, kebijakan di bidang pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, kebijakan pembangunan di bidang pembangunan infrastruktur kewilayahan. Berbagai strategi yang dapat ditempuh dalam optimalisasi pengembangan ekonomi maritim di Sulawesi Tenggara berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki sehingga menjadikan kelautan (kemaritiman) sebagai *leading sector* dalam pembangunan ekonomi daerah.

Kata kunci: *Ekonomi Maritim, Perencanaan, Pengembangan*

ABSTRACT

The economic opportunities of the utilization of marine resources is so large in Southeast Sulawesi has been duly made a great contribution also for the improvement of the regional economy, and even become the driving sectors of the regional economy are dominant. However, the potential of the maritime sector has not been optimally, which is characterized by the contribution of the fisheries sector to the regional economy that is still lower than the agricultural and plantation sectors and socio-economic conditions of the people who come into contact with maritime sector has not been encouraging. This study aims to identify policies that support the maritime economy and maritime economic development strategy in Sulawesi. The result showed that there are various policies identified in supporting the development of the maritime economy in Southeast Sulawesi, among others: the policy in the field of regional economic development, policies in the field of transport, policies in the field of fisheries policy in the field of development of tourism and creative economy, policy development in the field of infrastructure development cantonal. Various strategies that can be taken in the optimization of the development of the maritime economy in Southeast Sulawesi based on the potential and opportunities of making marine (maritime) as the leading sector in the economic development area.

Keywords: *Maritime Economy, Planning, Development*

PENDAHULUAN

Salah satu agenda prioritas pembangunan wilayah oleh Presiden melalui Konsep Nawacita adalah pembangunan kemaritiman. Pembangunan kemaritiman tidak lagi diposisikan sebagai sektor pinggiran (*peripheral sector*) tetapi dipandang sebagai motor penggerak perekonomian nasional sekaligus menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Fakta menunjukkan bahwa 75% dari total wilayah kedaulatan Indonesia merupakan wilayah perairan mempertegas bahwa potensi kemaritiman Indonesia sangat besar. Demikian pula kondisi Sulawesi Tenggara yang sebagian besar wilayahnya merupakan kepulauan mencerminkan peran sektor kemaritiman menjadi bagian yang menentukan perputaran roda perekonomian daerah ataupun terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Kontribusi sektor kemaritiman terhadap pembentukan PDRB ataupun daya serap terhadap tenaga kerja di Sulawesi Tenggara cukup tinggi.

Keberadaan potensi kemaritiman tersebut belum termanfaatkan secara baik. Dari aspek pemanfaatan potensi luas laut, diketahui bahwa hanya 41 persen yang baru termanfaatkan dari 72 persen luas laut Sulawesi Tenggara. Produksi perikanan dalam kurun lima tahun terakhir mengalami penurunan (tahun 2011 sebanyak 227 ribu ton dan tahun 2015 sebanyak 129 ribu ton). Sektor perikanan belum menonjol dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, masih lebih rendah dibandingkan sektor pertanian dan perkebunan (Bappenas, 2016).

Di sisi lain, potensi ekonomi strategis lainnya di sektor kemaritiman terutama pada aspek wisata bahari, transportasi laut, ataupun jasa kelautan cukup menggembirakan. Sekalipun relatif masih rendah, namun tingkat kunjungan wisatawan pada destinasi wisata bahari terus meningkat dari tahun ke tahun (BPS, 2015). Keberadaan transportasi laut dalam membangun konektivitas antar wilayah kabupaten/kota sekalipun belum memadai namun telah memicu ragam dan jenis kegiatan ekonomi masyarakat, mobilitas arus barang cenderung membaik, jumlah penggunaan (*demand*) terhadap jasa transportasi laut terus mengalami peningkatan yang kesemuanya menandai bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tumbuh seiring dengan pembangunan ekonomi maritim di daerah ini.

Kusumastanto (2010) mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia belum memanfaatkan potensi kelautan dengan sungguh-sungguh, masih diperlukan keberpihakan terhadap pembangunan ekonomi sektor maritim. Setidaknya terdapat tujuh spektrum ekonomi strategis dalam pembangunan ekonomi maritim yakni perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi kelautan, industri kelautan/maritim, transportasi laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan. Sebagian besar spektrum ekonomi strategis tersebut berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara.

Peneliti memandang bahwa belum optimalnya peran sektor kemaritiman di Sulawesi Tenggara ditengarai oleh

beberapa faktor diantaranya potensi dan kekuatan ekonomi kemaritiman belum terdata dan terkonsolidasi dengan baik serta keterbatasan kapasitas daerah termasuk kelengkapan regulasi dalam memperkuat pengelolaan kemaritiman berdasarkan potensi lokal. Aspek perencanaan menjadi bagian penting yang dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi maritim untuk memastikan posisi Sulawesi Tenggara sebagai wilayah kemaritiman yang potensial. Kekayaan sumber daya maritim tersebut setidaknya mampu ditransformasi menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dan menjadi *newleading sector* perekonomian daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang mendukung ekonomi maritim serta strategi pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perencanaan pembangunan maupun terhadap kebijakan pengembangan ekonomi daerah sektor kemaritiman.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan metode studi deskriptif disertai analisis data-data yang relevan. Pemilihan objek studi secara *purposive* pada wilayah yang memiliki potensi ekonomi maritim yang cukup besar. Metode perolehan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan SWOT analisis yang disertai dengan deskripsi

dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh (Daryanto, 2010).

Konsep operasional

Waterson (1965) mengungkapkan bahwa perencanaan merupakan usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan. Conyers & Hills (1994) menegaskan bahwa perencanaan merupakan proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Todaro (2000); memberikan penekanan pada upaya pemerintah untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan variabel ekonomi tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya perencanaan menekankan pada alokasi sumber daya pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dahuri R. (1991), perencanaan terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Perencanaan terpadu biasanya dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keter-

libatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Seringkali, keterpaduan juga diartikan sebagai koordinasi antara tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan yang meliputi : pengumpulan dan analisis data, perencanaan, implementasi.

Arsyad, R., (2012) mengungkapkan bahwa istilah maritim sesungguhnya lebih komprehensif, yaitu tidak hanya melihat laut secara fisik, wadah dan isi, tetapi juga melihat laut dalam konteks geopolitik, terutama posisi Indonesia dalam persilangan antara dua benua dan dua samudra serta merupakan wilayah laut yang sangat penting bagi perdagangan dunia.

Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan delapan misi pembangunan Indonesia, diantaranya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan, yang menjelaskan bahwa salah satu misi pembangunan Indonesia dalam 25 tahun kedepan adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan cara menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan

mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Kusumastanto (2012) mengemukakan bahwa konsep ekonomi kelautan mengedepankan pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya kelautan (*ocean based resource*) dan fungsi laut secara bijaksana sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan didukung oleh pilar-pilar ekonomi berbasis daratan (*land based economy*) yang tangguh dan mampu bersaing dalam kancah kompetisi global antar bangsa.

Prasetya (2016) menegaskan bahwa beragamnya potensi laut Indonesia yang berupa sumber daya perikanan, sumber daya minyak dan gas bumi, pariwisata bahari, industri dan jasa maritim, serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dapat menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi apabila dikelola dengan maksimal.

HASIL

Tabel 1. Strategi Pengembangan Ekonomi Maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara

<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi percepatan pembangunan 2. Posisi geografis yang strategis 3. Pengembangan Energi Terbarukan 4. Berlakunya pasar bebas di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 5. Meningkatnya permintaan produk dan jasa kelautan 	<p>Treatth (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran dan Degradasi lingkungan 2. Bencana alam dan <i>climate change</i> 3. Ketergantungan terhadap kondisi alam 4. Meningkatnya daya saing daerah di luar Sulawesi Tenggara dan negara tetangga 5. Konflik kepentingan
<p>Strengtht (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan potensi sumber daya kelautan yang besar 2. Dukungan legislasi dan regulasi kelautan dan perikanan 3. Kesiapan lembaga pendukung yang memadai dan kompeten, seperti pemerintah, penyuluh, perguruan tinggi, dll. 4. Superioritas wilayah 	<p>S-O</p> <p>Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan secara efektif dan efisien</p> <p>Pengembangan kapasitas kelembagaan maritim dan kemitraan</p> <p>Peningkatan peran lembaga pendukung yang memadai</p>	<p>S-T</p> <p>Mengembangkan intervensi dalam menghadapi <i>climate change</i> dan mitigasi bencana</p> <p>Hukum dan aturan tata kelola laut</p> <p>Pemetaan laut dan Pembentukan kawasan ekonomi maritim</p>
<p>Weakness (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keunggulan wilayah sebagian besar masih bersifat komparatif. 2. Belum ada kesepakatan penetapan kawasan 3. Terbatasnya tenaga yang terampil 4. Terbatasnya infrastruktur kelautan termasuk bangunan pelabuhan, industri kelautan, pemasaran dan pariwisata, listrik, komunikasi, sentra kegiatan perikanan, jalan, dll. 5. Rendahnya minat investor menanamkan modalnya di bidang kelautan. 6. Lemahnya koordinasi lintas sektor. 7. Terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum 8. Ketersediaan data informasi dan akses pasar 	<p>W-O</p> <p>Pencitraan keunggulan wilayah</p> <p>Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas maritim</p> <p>Basis Data</p>	<p>W-T</p> <p>Pengembangan budaya maritim</p> <p>Meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi terutama regulasi ekonomi perikanan antar sektor maupun antar pusat dan daerah</p>

PEMBAHASAN

Identifikasi Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Maritim

Berbagai kebijakan yang diidentifikasi dalam mendukung pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain:

1. Kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Daerah melalui peningkatan ekonomi masyarakat berbasis komoditas dan pengembangan investasi daerah. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis komoditas diantaranya:
 - Peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BAHTERAMAS akan ditingkatkan menjadi salah satu lembaga keuangan untuk mendukung proses peningkatan nilai tambah melalui proses industrialisasi.
 - Pembangunan klaster industri pedesaan akan dibangun dalam bentuk klaster usaha. Berkaitan dengan itu maka kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan secara terintegrasi pada pusat-pusat klaster sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Peningkatan daya saing komoditas melalui upaya menjaga keberlanjutan produksi dan penggunaan teknologi serta peningkatan nilai tambah yang dikerjakan oleh masyarakat desa.

Pengembangan Investasi Daerah, diantaranya:

- Menetapkan tata ruang wilayah yang meliputi penetapan pusat-pusat kegiatan berdasarkan struktur ruang, pengaturan pola ruang dan penetapan kawasan strategis.
 - Mengembangkan kawasan strategis yang meliputi : kawasan industri pertambangan di Konawe Utara, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara dan Buton; kawasan pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kabupaten Konawe; kawasan industri perkebunan, kawasan industri kelautan dan perikanan, kawasan ekonomi terpadu di Teluk Kendari; kawasan industri semen dan kawasan pariwisata di Wakatobi.
 - Pengembangan kawasan strategis akan disinergikan dengan pembangunan ekonomi masyarakat, terutama terkait dengan kegiatan yang terjadi akibat *multiplier effect* dari pengembangan kawasan-kawasan tersebut.
2. Kebijakan di Bidang Perikanan
 - Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan pelabuhan perikanan melalui pengembangan kawasan industri perikanan terpadu, motorisasi, peningkatan jumlah armada dan alat tangkap, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan
 - Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan melalui ekstensifikasi, rehabilitasi

- dan revitalisasi lahan budidaya serta peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan
- Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan balai benih perikanan melalui penyediaan induk unggul, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana, penerapan sertifikasi perbenihan serta penguatan kelembagaan UPR
 - Peningkatan mutu hasil perikanan melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan
 - Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan melalui penetapan industri perikanan terpadu dan pengembangan infrastruktur
 - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan melalui pelatihan, magang dan penguatan kelembagaan
 - Pengelolaan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan melalui pengembangan rencana strategis pesisir dan pulau-pulau kecil dan penetapan kawasan konservasi laut daerah
 - Pendayagunaan pulau-pulau kecil melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar pulau-pulau kecil
 - Pengembangan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi pengawasan masyarakat, operasi pengawasan secara reguler dan terpadu, serta peningkatan sarana prasarana pengawasan
 - Peningkatan pelayanan administrasi dan publik melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia
 - Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui capaian laporan kinerja dan keuangan serta pengembangan perencanaan
 - Mendorong kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas perempuan
3. Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Melakukan tata kelola administrasi dan manajemen dengan dukungan sumber daya yang tersedia
 - Peningkatan kemampuan sumber daya manusia parekraf melalui pelatihan, pembekalan, standarisasi dan sertifikasi usaha dan profesi
 - Peningkatan promosi budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif
 - Peningkatan kreativitas karya seni pertunjukan
 - Mengembangkan potensi pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata.
 - Berkembangnya potensi dan kreatifitas masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pariwisata
4. Kebijakan di bidang Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan prioritas pengembangan sektor-sektor produksi seperti pusat-pusat pemukiman masyarakat, sentra-sentra produksi pertanian,

kawasan-kawasan tumbuh cepat, *outlet* komoditas dan lain-lain. Kebijakan tersebut diantaranya:

- Pembangunan sarana prasarana transportasi terpadu di tingkat wilayah
 - Pembangunan sarana prasarana telekomunikasi dan *telecentre*, untuk pelayanan pemerintahan dan perekonomian
 - Pembangunan sumber daya air
 - Pembangunan sarana prasarana sanitasi dan air minum
 - Pembangunan energi alternatif, dengan memanfaatkan tenaga air, surya, angin dan panas bumi
 - Pembangunan sarana prasarana desa dan kecamatan
 - Pembangunan sarana prasarana kawasan strategis. Pada periode Tahun 2008-2013 telah dirancang beberapa kawasan strategis yang potensial untuk meningkatkan nilai tambah secara signifikan yaitu kawasan pertambangan Asera, Wiwirano dan Langgikima (AWILA), kawasan pertambangan Kolaka Utara, Kawasan Pertambangan Watekule Kabaena Bombana, Kawasan Industri Kakao di Ladongi Kolaka, Kawasan Industri Rumput Laut di Baubau dan Buton serta kawasan Industri Pariwisata di Wakatobi. Kawasan-kawasan ini diharapkan mampu menjadi pemicu terhadap pembangunan masyarakat dan daerah sekitar melalui proses peningkatan nilai tambah.
5. Kebijakan di Bidang Perhubungan
- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

- Mengembangkan sarana prasarana transportasi darat melalui pengembangan fasilitas angkutan jalan dan angkutan penyeberangan
- Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut melalui pengembangan fasilitas angkutan laut
- Mengembangkan infrastruktur pada kawasan strategis melalui pengembangan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis
- Mengintegrasikan pelayanan administrasi perizinan perhubungan kedalam PTSP melalui *debirokratisasi* dan koordinasi pelayanan sistem
- Mengembangkan regulasi standar pelayanan melalui penetapan standar pelayanan angkutan, meningkatkan disiplin pelayanan pada fasilitas angkutan.

SIMPULAN

Untuk menjadikan kelautan (kemaritiman) sebagai *leading sector* dalam pembangunan ekonomi daerah, maka pendekatan kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan fokus pembangunan kemaritiman cukup luas yang terdiri dari berbagai sektor ekonomi yang melibatkan instansi perhubungan, energi, pariwisata, industri dan perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan.

Dengan melihat peluang yang dimiliki, maka wilayah Sulawesi Tenggara memungkinkan menjadi pusat pengembangan ekonomi maritim. Untuk mencapai tujuan tersebut, Sulawesi

Tenggara membutuhkan infrastruktur kepelabuhanan yang memadai dan terintegrasi dengan wilayah industri untuk memenuhi kebutuhan logistik dan perikanan. Perlu dibentuk pusat-pusat pendidikan yang berbasis maritim baik pelaut, teknik perkapalan dan nelayan di semua wilayah kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan, dibentuk lembaga keuangan penunjang ekonomi/industri perikanan serta kemudahan-kemudahan berinvestasi di dunia kemaritiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Tenggara. Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah 2013-2018. Kendari. [http://bappeda sultra.go.id](http://bappeda.sultra.go.id).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Sulawesi Tenggara dalam Angka 2015*. Kendari
- Daryanto. A dan Yundy Hafizrianda. 2010. *Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. IPB Press. Bogor
- Dinas Kelautan dan perikanan (DKP). 2015. *Pengembangan Kasawan Wisata Bahari*. Kabupaten Wakatobi.
- Floysand, A. and Bjorn Lindkvist, 2001. Globalization, Local Capitalism and Fishery Communities in Change. *Marine Policy Journal* 25 (2001). 113-121 p. Pergamon.
- Howard, M. and Anthony, B. 2001. The Political Economy of Japanese Distant Water Tuna Fisheries. *Marine Policy Journal* 25 (2001). 91-101 p. Pergamon.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI. 2016. *Pengembangan Kawasan Ekonomi Maritim*. Jakarta
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2015. *Pemetaan sosial ekonomi sumber daya pesisir berbasis kawasan*. BBPSEKP KKP. Jakarta.
- Harvard Kennedy School. 2014. *The Sum is Greater Than The Parts. Melipatgandakan Kemakmuran di Indonesia Melalui Integrasi Lokal dan Global*. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. 2004. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kusumastanto. T. 2006. *Ekonomi Kelautan*. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kusumastanto, T. 2012. *Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim*. IPB. Bogor.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Wuryanto, Luky Eko. 2014. *Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Regional dan Global*. *Seminar tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maritim*.
- Prasetyo, Herlan. 2016. *Konsep Poros Maritim sebagai Paradigma Baru dalam Pembangunan Nasional*. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Malang.
Malang.

Prasetya, Whisnu Bagus. 2014. Poros Maritim dalam Perspektif Pembangunan Nasional. *Laporan Akhir Tahun. Worldmaritimenews. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/234464-poros-maritim-dalam-perspektif-pembangunan-nasional.html>*

Todaro, S.C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta

Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.